

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada Bulan Januari 2024 Provinsi Lampung mengalami deflasi 0,19% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Desember 2023 yang mengalami inflasi 0,01% (mtm) dan rata-rata inflasi bulan Desember pada 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi 0,34% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan empat kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan Januari 2024 tercatat sebesar 3,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,57% (yoy). Deflasi tersebut didorong oleh didorong oleh melambatnya harga pada beberapa komoditas seperti: cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan kembung dengan andil masing-masing sebesar -0,136%; -0,086%; -0,064%; -0,026%; dan -0,023%
 2. Pada Bulan Februari 2024 mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode Januari 2024 yang mengalami deflasi 0,19% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan empat kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan Februari 2024 tercatat sebesar 3,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,75% (yoy). Inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar 0,31%; 0,15%; 0,06%; 0,04%; dan 0,04%.
 3. Pada Bulan Maret 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Februari 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm). Tingkat inflasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi gabungan di Provinsi Lampung bulan Maret pada 3 (tiga) tahun terakhir dan tingkat inflasi nasional yang masing-masing tercatat sebesar 0,44% (mtm) dan 0,52% (mtm). Secara tahunan, IHK gabungan di Provinsi Lampung bulan Maret 2024 tercatat mengalami inflasi 3,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Sumatera dan nasional yang masing-masing tercatat sebesar 3,47% (yoy) dan 3,05% (yoy) Inflasi pada bulan Maret didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, ayam hidup, dan kopi bubuk dengan andil masing-masing sebesar 0,12%; 0,11%; 0,09%; 0,07%; dan 0,05%
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. kenaikan permintaan agregat yang didorong oleh realisasi belanja Pemerintah dan Pelaksanaan Pemilu pada tahun politik, serta berlanjutnya penyaluran bansos;
2. Berlanjutnya ketidakpastian global seiring masih berlanjutnya tensi geopolitik berpotensi mendorong peningkatan harga emas dunia
3. Kenaikan UMP sebesar 3,16% pada tahun 2024 berpotensi mendorong peningkatan permintaan meski diperkirakan tidak akan begitu signifikan
4. Risiko meningkatnya harga komoditas hortikultura yaitu Cabai dan Bawang pada periode tanam
5. Risiko kontraksi produksi padi Lampung berdasarkan prognosa Kementan

ketidakpastian kondisi perang di Timur Tengah berisiko menyebabkan revisi ke atas harga minyak dan gas dunia tahun 2024

7. Potensi kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%
 8. Risiko terbatasnya ketersediaan beras akibat mundurnya puncak produksi padi akibat El Nino
 9. meningkatnya harga referensi minyak kelapa sawit pada awal tahun.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang telah di Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET
2. Penggunaan dana BTT untuk Operasi Pasar pada triwulan IV 2023 yang difokuskan pada komoditas beras di 400 titik selama 50 hari pada (8 titik/hari). Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi dengan PT. Wahana Raharja (BUMD) untuk pelaksanaannya dengan dukungan belanja subsidi Rp2.100/kg untuk menjaga harga beras, terutama medium, agar tetap di bawah HET yang berlaku.
3. Melakukan monitoring harga dan pasokan , khususnya pada komoditas-komoditas sbb:
 - Komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya: beras, telur ayam, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, bawang putih, daging ayam, dan gula pasir.
 - Komoditas yang relatif terjaga, namun masih memiliki risiko kenaikan harga: bawang putih, bawang merah, cabai, telur ayam dan daging ayam
4. Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi Lampung, utamanya untuk komoditas yang sering bergejolak di Kota IHK.
5. Perluasan Kerjasama Perdagangan antar Daerah dengan Kepulauan Riau dan Bali untuk memperkuat stabilitas harga pangan di masing-masing Provinsi
6. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat penanaman padi, optimalisasi peran bendungan, pendistribusian bibit yang cukup resisten terhadap kekeringan, dan pendistribusian traktor/alsintan.
7. Memastikan kelancaran transportasi serta angkutan udara, darat, dan laut melalui koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga lalu lintas angkutan barang dan manusia.
8. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung - Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung - Bali, serta operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.
9. Penyampaian substansi koordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
10. Melakukan rapat koordinasi secara formal, dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal, melalui WhatsApp Group, dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
11. Penguatan koordinasi antar OPD dan Kabupaten/Kota dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 23 tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah.
12. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying.
13. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat

penanaman padi, optimalisasi peran bendungan dan pompanisasi, pendistribusian varietas yang cukup resisten terhadap genangan, dan pendistribusian traktor/alsintan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut: TPID dan Satgas Pangan perlu terus berkoordinasi dalam mengendalikan inflasi daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memantau ketersediaan pasokan, keamanan dan kelayakan pangan di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui TPID yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah Masing-masing.
2. Menyelenggarakan pasar murah bekerjasama dengan beberapa BUMN/D dan Pihak Swasta di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Secara konsisten dan bersama-sama memantau perkembangan harga pasar yang dilakukan masing-masing TPID baik tingkat Provinsi Lampung maupun tingkat Kabupaten/Kota.
4. SatgasPangan mengawasi kelancaran dan keamanan distribusi komoditas pangan dan memastikan ketersediaan BBM dan elpiji dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Sidak Satgas Pangan dengan melakukan sidak ke distributor.